

## PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KOTA BANJARMASIN

Oleh: Muhammad Insanul Kamil

Mahasiswa Program Doktor Administrasi Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat

Email: [kamil\\_kb4@gmail.com](mailto:kamil_kb4@gmail.com)

### Abstract

This study aims to analyze the role of school committees in community empowerment in Banjarmasin City. School committees are independent bodies established to facilitate community involvement in improving the quality of education services. In the context of community empowerment, school committees act as strategic partners in decision-making, supervision, and support for the implementation of education in schools. This research employs a qualitative approach with data collected through interviews, observations, and documentation. The findings indicate that school committees in several schools in Banjarmasin have made positive contributions in encouraging community participation, particularly in the form of moral, material, and idea-based support for educational programs. However, their role still faces several challenges, such as limited understanding of their duties and functions, as well as inadequate human resource capacity. Therefore, strengthening the capacity and role of school committees through training, outreach, and supportive regulations is necessary to optimize their contribution to community empowerment.

**Keywords:** School Committee, Community Empowerment, Participation, Education

### A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan bangsa, karena melalui pendidikan kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Dalam upaya mewujudkan pendidikan yang bermutu, diperlukan keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan adalah melalui keberadaan komite sekolah. Komite sekolah dibentuk sebagai wadah representatif masyarakat dalam mendukung, mengawasi, dan memberikan masukan terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Menurut Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, komite

sekolah merupakan lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu layanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana, serta pengawasan pendidikan di satuan pendidikan. Dalam konteks ini, komite sekolah tidak hanya menjadi mitra sekolah, tetapi juga agen pemberdaya masyarakat melalui pendidikan. Komite sekolah diharapkan mampu menjembatani hubungan antara sekolah dan masyarakat serta mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan pendidikan (Mulyasa, 2013).

Di Kota Banjarmasin, peran komite sekolah menjadi semakin penting mengingat masih adanya tantangan dalam hal keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kebutuhan akan peningkatan

kualitas layanan pendidikan. Melalui penelitian ini, penulis ingin menggambarkan sejauh mana peran komite sekolah dalam memberdayakan masyarakat, serta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan peran komite sekolah sebagai motor penggerak partisipasi masyarakat dalam pendidikan.

## B. Kajian Teori

### 1. Komite Sekolah

Komite sekolah merupakan representasi dari orang tua/wali peserta didik, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya yang dibentuk untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Menurut Permendikbud No. 75 Tahun 2016, komite sekolah bertugas memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, mendukung baik dalam bentuk finansial maupun non-finansial, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Menurut Mulyasa (2013), komite sekolah merupakan mitra sekolah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang partisipatif, akuntabel, dan berkualitas. Dalam praktiknya, komite sekolah tidak hanya berperan sebagai pendukung, melainkan juga sebagai penghubung antara masyarakat dan sekolah dalam rangka memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.

### 2. Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan mencerminkan kesadaran kolektif bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Tilaar (2009) menyatakan bahwa

partisipasi masyarakat dapat meningkatkan relevansi dan efektivitas pendidikan karena masyarakat lebih memahami kebutuhan lokal. Bentuk partisipasi ini bisa berupa pemikiran, tenaga, dana, maupun pengawasan sosial terhadap program pendidikan.

### 3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah proses meningkatkan kapasitas dan peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka sendiri. Suharto (2005) menjelaskan bahwa pemberdayaan melibatkan upaya untuk meningkatkan akses terhadap sumber daya, memperkuat kontrol sosial, serta membangun kemandirian masyarakat.

Dalam konteks pendidikan, pemberdayaan masyarakat melalui komite sekolah berarti memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam merencanakan, mengawasi, dan mengevaluasi program pendidikan. Hal ini penting agar masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan dan kualitas pendidikan di lingkungannya (Sudjana, 2004).

### 4. Hubungan antara Komite Sekolah dan Pemberdayaan Masyarakat

Komite sekolah dapat berperan sebagai agen perubahan dalam memberdayakan masyarakat, terutama melalui keterlibatan mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan program sekolah yang melibatkan masyarakat. Ketika komite sekolah berfungsi dengan baik, masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya pendidikan dan terdorong untuk berpartisipasi secara aktif. Ini sesuai dengan konsep pemberdayaan yang menekankan peningkatan partisipasi, penguatan kapasitas, dan kemandirian sosial (Chambers, 1995).

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam peran komite sekolah dalam proses pemberdayaan masyarakat di Kota Banjarmasin. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi makna, pengalaman, serta interaksi sosial yang terjadi antara sekolah dan masyarakat (Moleong, 2017).

#### 1. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian dilakukan di beberapa sekolah dasar dan menengah di Kota Banjarmasin, baik negeri maupun swasta, yang memiliki komite sekolah aktif. Subjek penelitian meliputi anggota komite sekolah, kepala sekolah, guru, serta perwakilan masyarakat atau orang tua murid. Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2017).

#### 2. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama:

- a. Wawancara mendalam, untuk menggali persepsi dan pengalaman informan terkait peran komite sekolah.
- b. Observasi partisipatif, untuk melihat secara langsung keterlibatan komite dalam kegiatan sekolah dan masyarakat.
- c. Studi dokumentasi, seperti notulen rapat komite, program kerja, laporan kegiatan, dan arsip sekolah lainnya.

#### 3. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis interaktif sebagaimana

dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang terdiri atas tiga tahapan:

- a. Reduksi data (memilih dan merangkum informasi penting),
- b. Penyajian data (dalam bentuk narasi atau matriks), dan
- c. Penarikan kesimpulan/verifikasi.

### D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan pada lima sekolah di Kota Banjarmasin, terdiri dari tiga sekolah dasar negeri dan dua sekolah menengah pertama, dengan melibatkan 15 informan yang terdiri dari anggota komite sekolah, kepala sekolah, dan orang tua murid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite sekolah telah memainkan peran dalam beberapa aspek pemberdayaan masyarakat, meskipun masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi.

#### 1. Peran Komite Sekolah sebagai Mediator antara Sekolah dan Masyarakat

Komite sekolah berperan sebagai jembatan komunikasi antara pihak sekolah dan masyarakat. Dalam beberapa kasus, komite berhasil mendorong partisipasi orang tua dalam program-program sekolah, seperti kegiatan keagamaan, kebersihan lingkungan, dan peningkatan fasilitas belajar. Hal ini menunjukkan bahwa komite mampu menjadi saluran aspirasi masyarakat (Mulyasa, 2013).

Salah satu kepala sekolah menyatakan:

*“Kami merasa terbantu karena komite sekolah aktif membantu menyampaikan aspirasi orang tua dan menjembatani pemahaman antara sekolah dan wali murid.”*

Peran ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Sudjana (2004) bahwa keberadaan komite sekolah yang aktif dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pendidikan.

## 2. Dukungan dalam Sumber Daya dan Kegiatan Sekolah

Komite sekolah juga berperan dalam mendukung kegiatan sekolah secara material maupun non-material. Beberapa sekolah mendapatkan bantuan dana atau tenaga sukarela dari masyarakat melalui inisiatif komite sekolah. Misalnya, dalam kegiatan pembangunan taman baca atau renovasi kelas, komite menjadi penggerak gotong royong masyarakat.

Namun, tingkat partisipasi ini sangat tergantung pada kapasitas dan jaringan sosial anggota komite, serta hubungan yang harmonis dengan kepala sekolah. Di sekolah yang relasi antar-pihak kurang baik, peran komite cenderung pasif.

## 3. Tantangan dan Hambatan dalam Pemberdayaan

Beberapa hambatan utama yang ditemukan adalah:

- a. Kurangnya pemahaman komite terhadap fungsi dan tanggung jawabnya,
- b. Minimnya pelatihan atau pembekalan dari dinas pendidikan,
- c. Kurangnya keterlibatan masyarakat karena kesibukan atau rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan.

Menurut Tilaar (2009), partisipasi masyarakat dalam pendidikan tidak dapat tumbuh secara spontan, melainkan harus dibina melalui proses pendidikan politik dan sosial yang berkelanjutan.

Pembinaan terhadap komite sekolah sangat penting agar mereka tidak hanya menjadi “pelengkap administrasi”, melainkan menjadi agen pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan. Ini sesuai dengan pandangan Suharto (2005) bahwa pemberdayaan harus dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan kontrol sosial terhadap kebijakan publik.

## E. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa komite sekolah di Kota Banjarmasin memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat, terutama sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat, pendukung kegiatan sekolah, serta pelopor partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Komite sekolah yang aktif mampu mendorong keterlibatan masyarakat secara lebih luas dalam mendukung proses pendidikan, baik dari segi ide, tenaga, maupun sumber daya.

Namun, peran tersebut belum optimal secara merata di semua sekolah. Masih terdapat berbagai hambatan, seperti rendahnya pemahaman tentang fungsi komite, kurangnya pelatihan, dan minimnya dukungan dari pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, pemberdayaan melalui komite sekolah perlu ditingkatkan agar partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

## F. Saran

### 1. Peningkatan Kapasitas Komite Sekolah

Pemerintah daerah dan dinas pendidikan perlu menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan bagi anggota komite sekolah agar memahami peran, tugas, dan strategi pemberdayaan masyarakat secara lebih komprehensif.

### 2. Penguatan Kolaborasi antara Sekolah dan Komite

Kepala sekolah perlu membangun komunikasi yang terbuka dan sinergis dengan komite agar dapat menciptakan suasana kerja sama yang produktif dalam membangun lingkungan sekolah yang partisipatif.

### 3. Sosialisasi kepada Masyarakat

Perlu dilakukan sosialisasi secara terus-menerus kepada masyarakat mengenai

pentingnya peran serta dalam pendidikan, sehingga kesadaran dan partisipasi masyarakat dapat meningkat secara alami.

#### 4. Evaluasi Berkala Peran Komite

Perlu adanya evaluasi berkala terhadap kinerja komite sekolah agar dapat diketahui sejauh mana kontribusinya dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan mutu pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chambers, R. (1995). *Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts?* Brighton: IDS.
- Damanik, E. (2019). Pendidikan Berbasis Masyarakat dalam Perspektif Teori Sosial Kritis dan Lingkungan. *Jurnal Kependidikan dan Keguruan*, 6(2), 88–96.
- Eckersley, R. (1992). *Environmentalism and Political Theory: Toward an Ecocentric Approach*. SUNY Press.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Jakarta: Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2013). *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Permendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Jakarta: Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Sihombing, R. (2015). Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 22(1), 55–62.

Sudjana, D. (2004). Pendidikan Nonformal: Wawasan, Sejarah Perkembangan, Falsafah, Teori Pendukung, Asas. Bandung: Falah Production.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suharto, E. (2005). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: Refika Aditama.

Tilaar, H. A. R. (2004). Manajemen Pendidikan Nasional: Kajian Strategis Kebijakan Pendidikan Nasional dalam Abad ke-21. Rineka Cipta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.